



ANALISA PENERAPAN KONSEP UNIVERSAL DESAIN PADA BANGUNAN PELAYANAN PUBLIK

Studi Kasus : Gedung Kantor Pemerintahan DUKCAPIL Bandar Lampung

Guruh Kristiadi Kurniawan¹, Novita Hillary Christy Damanik², Luthfiah Salsabila Nasution³, Novita Dea Ananda⁴

Institut Teknologi Sumatera

Email: guruh.kristiadi@ar.itera.ac.id, novita.damanik@ar.itera.ac.id, Luthfiah.120240034@student.itera.ac.id, Novita.120240035@student.itera.ac.id

Informasi Naskah:

Diterima:

3 Maret 2024

Direvisi:

2 Agustus 2024

Disetujui terbit:

13 Agustus 2024

Diterbitkan:

Cetak:

29 September 2024

Online

29 September 2024

Abstract. Government offices are state-owned buildings that serve the purpose of official duties and providing public services or services related to various agencies. However, many government offices, which are public service providers, do not sufficiently support public service accessibility for people with disabilities. Therefore, it is essential to conduct a study on the implementation of the Universal Design concept for people with disabilities in various cities in Indonesia. The aim of this research is to understand how the spatial configuration within public service buildings, particularly the universal design for people with disabilities, is applied at the Civil Registration Office (DUKCAPIL) in Bandar Lampung. The research methodology used is a qualitative approach, where the identification of universal design is chosen within the DUKCAPIL building area in Bandar Lampung. The analysis extends to redesigning based on literature studies in accordance with the standards of the Ministry of Public Works and Public Housing. The conclusion drawn from the case study is that applying the universal design concept to public service buildings is feasible.

Keyword: Government Office, Universal Design, Accessibility, Public Service, Re-Design

Abstrak: Kantor Pemerintahan merupakan gedung milik negara yang memiliki fungsi untuk keperluan dinas dan kantor pelayanan masyarakat atau instansi terkait. Namun, masih banyak Kantor Pemerintahan sebagai pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah tidak mendukung aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian tentang penerapan konsep Universal Desain untuk penyandang disabilitas di berbagai kota di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana konfigurasi ruang dalam bangunan pelayanan publik khususnya universal desain penyandang disabilitas pada Kantor Pemerintahan DUKCAPIL Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis pendekatan metodologi kualitatif dimana identifikasi universal design dipilih di area Gedung DUKCAPIL Bandar Lampung serta menganalisis hingga melakukan perancangan kembali dengan data kajian literatur sesuai standar Kementerian PUPR. Kesimpulan yang didapatkan, studi kasus menerapkan konsep universal desain dan disimpulkan bahwa konsep universal bisa diterapkan pada bangunan pelayanan publik.

Kata Kunci: Kantor Pemerintah, Universal Design, Aksesibilitas, Pelayanan Publik, Re-Design

PENDAHULUAN

Kantor Pemerintah merupakan sebuah tempat yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik antara pegawai Kantor dengan orang yang memiliki kepentingan di dalamnya. Kebanyakan Kantor Pemerintah hanya memiliki satu fungsi, yaitu sebagai Kantor Pemerintah (Kantor Pemerintah Kota Malang, 2022). *Universal Design* adalah desain dan komposisi dari suatu lingkungan sehingga dapat diakses, dipahami, dan digunakan semaksimal mungkin oleh semua orang tanpa memandang usia, ukuran, kemampuan, atau kecacatannya (Otoritas Disabilitas Nasional, 2019). Difabel atau *people with different ability* merupakan istilah yang digunakan

untuk penyandang cacat fisik atau masyarakat dengan kebutuhan khusus. Kesulitan mengakses berbagai tempat umum, gedung perkantoran, serta angkutan umum menjadikan beban tambahan tersendiri bagi seorang difabel. Bangunan-bangunan di Indonesia yang menerapkan konsep desain universal mengacu pada Permen PU no.30 tahun 2006, yang mengatur mengenai aksesibilitas dan fasilitas pada bangunan gedung dan lingkungan. Terdapat 4 asas aksesibilitas dan fasilitas menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yaitu, Keselamatan, Kemudahan, Kegunaan, Kemandirian. Konsep *universal design* mengacu pada ide-ide yang menghasilkan suatu desain

bangunan, produk, maupun lingkungan yang dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan, dengan kemampuan dan karakter yang berbeda-beda. Sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik. Tercantum dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas pasal 18 tentang hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dengan layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu dan pasal 19 membahas hak pelayanan publik bagi penyandang disabilitas seperti memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan public secara optimal, bermartabat tanpa diskriminasi, dan pendampingan, penerjemahan serta penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat pelayanan publik tanpa tambahan biaya. Dengan demikian, penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi, kejam, atau merendahkan martabat manusia. Mereka juga berhak untuk dihormati secara mental dan fisik seperti orang lain, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri.

Substansi baru dalam Peraturan Menteri PUPR 14/2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung dengan penyesuaian nomenklatur berdasarkan UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Berikut ini 7 Prinsip Universal Desain:

1. Kesetaraan Penggunaan Ruang, pada prinsip pertama ini yaitu *equitable use* (penggunaan yang adil) dijadikan prinsip pertama karena dalam mendesain umumnya bangunan atau sejenisnya harus dapat digunakan secara secara wajar oleh semua orang.
2. Kemandirian & Fleksibilitas Dalam Penggunaan Ruang, dalam prinsip-prinsip universal kedua merupakan penggunaan yang fleksibel atau mudah, penggunaan yang mudah dimaksudkan dengan desain mengakomodasi berbagai hak dan kemampuan individu, dengan menggunakan prinsip kedua dalam desain dapat membantu setiap individu melakukan kegiatan dengan mudah dan untuk mencapai hal tersebut.
3. Kemudahan Akses Bebas Hambatan, prinsip ketiga merupakan prinsip yang juga harus ada pada desain, prinsip yang menitik beratkan pada kemudahan dalam mencapai tujuan dan dapat dipahami oleh semua tanpa perlu menggunakan kemampuan pengalaman pengguna, pengetahuan, keterampilan bahasa atau tingkat konsentrasi tinggi.
4. Kemudahan Informasi, informasi yang jelas merupakan prinsip keempat dari prinsip-prinsip desain universal. Pada prinsip ini digunakan untuk pengguna dapat mengetahui secara jelas tanpa harus bertanya kepada orang lain yang memberi informasi.
5. Keselamatan & Keamanan, prinsip selanjutnya prinsip kelima adalah toleransi terhadap kesalahan yang dimaksud prinsip kelima ini adalah desain yang dibuat tidak membuat celaka pengguna baik itu dalam kondisi apapun.
6. Efisiensi Upaya Pengguna, upaya fisik yang rendah menjadikan prinsip ini di urutan selanjutnya yang dimaksud pada prinsip ini adalah dimana pengguna tidak harus mengeluarkan tenaga lebih untuk menggunakan hal tersebut, sehingga pengguna tidak letih berlebihan.
7. Kesesuaian Ukuran & Ruang Secara Ergonomis, pada urutan terakhir prinsip universal adalah ukuran dan ruang untuk pendekatan dan penggunaan, yang dimaksud dalam prinsip ini adalah dengan penggunaan ukuran dan ruang yang disediakan untuk pendekatan, jangkauan, dan manipulasi terlepas dari ukuran tubuh, postur atau mobilitas pengguna.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini termasuk kedalam sifat metode *social-constructivism*. Metode *socio-constructivism* akan memahami bagaimana suatu individu menanggapi suatu permasalahan melalui pengalaman dan interaksi sosial. Interpretasi penelitian akan memberikan makna yang menjadikan suatu tujuan penulisan jurnal. Berikut beberapa poin yang ada :

Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, berada di Jalan Dokter Susilo No.1A, Sumur Batu, Kec. Tik. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35212

Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis pendekatan metodologi kualitatif dimana identifikasi *universal design* yang dipilih di area Gedung DUKCAPIL Bandar Lampung serta menganalisis hingga melakukan perancangan dengan data kajian literatur sehingga mampu merancang suatu desain untuk penyandang disabilitas pada Gedung DUKCAPIL Bandar Lampung. Pengumpulan data untuk memuat analisis perancangan dilakukan dengan metode pengumpulan data primer dimana data yang didapat dari hasil *survey* ke objek yang dipilih dan melakukan observasi langsung bagi pengunjung dengan kebutuhan khusus/penyandang disabilitas di Gedung DUKCAPIL lantai 1. Pengumpulan data juga secara sekunder dengan membaca jurnal penelitian serupa, membaca buku dan literatur lainnya.

Metode Analisis Data

Penilaian terhadap gedung Pelayanan Publik ini dilakukan berdasarkan metode pengukuran area khusus difabel atau *survey* secara langsung dalam hal konfigurasi spasial, yang dikombinasikan dengan penilaian umpan balik dari pegawai maupun pengunjung yang ada di Gedung DUKCAPIL Bandar Lampung. Untuk ini, langkah-langkah berikut telah diadopsi: a) Mendesain kembali bagian difabel pada bangunan pelayanan publik, termasuk ruang dalam

dan luar lantai 1. b) Analisis tata letak fungsional ramp dilakukan dengan menggunakan media ukur dan menggambarkan kedalaman fungsi – fungsi dan data yang benar. c) Studi pemahaman dan interpretasi struktur kompleks ruang mengenai fasilitas Gedung pelayanan publik di area pintu masuk, toilet dan area pelayanan khusus difabel. d) Survei berdasarkan penilaian menggunakan wawancara kepada pengguna maupun pengunjung yang didistribusikan kepada 3 pegawai dan 1 pengguna. e) Terakhir, analisis korelasional hubungan antara jenis penyandang difabel dan penilaian pengelola.


Metodologi ini dirancang untuk memahami bagaimana konfigurasi ruang dalam bangunan pemerintah pelayanan publik khususnya universal desain penyandang disabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan ini menjelaskan tentang standar data yang digunakan serta diambil dari peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggunakan penerapan Konsep Universal Desain Pada Bangunan Pelayanan Publik dengan Studi Kasus : Gedung Kantor Pemerintahan DUKCAPIL Bandar Lampung. Berikut beberapa hasil ukuran yang telah kami dapatkan dengan standar sesuai ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Penataan Bangunan (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017) :
Tangga Pintu masuk utama



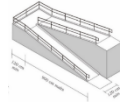
Gambar 1. Tangga Pintu masuk depan
Tabel.1 Ukuran tangga pintu masuk depan

No	Nama Ukuran	Hasil Ukuran (cm)	Standar Ukuran	Ketentuan
1.	Antrade (Lebar anak tangga)	45 cm	 Gambar 2. Standar ukuran tangga berdasarkan Kementerian PUPR Penjelasan : - Antrade : 30 cm - Optrade : 15 - 18 cm	Sudah memenuhi standar ukuran yang tepat
2.	Optrade (Tinggi anak tangga)	15 cm		
3.	Tinggi Tangga	195 cm		
4.	Jumlah anak tangga x lebar anak tangga	13 x 45 = 585 cm		

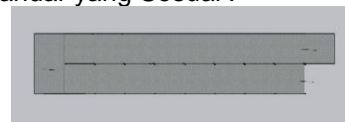
Ramp pintu masuk utama



Gambar 3. Ramp pintu masuk depan
Tabel.2 Ukuran ramp pintu masuk depan

No	Nama Ukuran	Hasil Ukuran (cm)	Standar Ukuran	Ketentuan
1.	Lebar Ramp	120 cm	 Gambar 4. Standar ukuran ramp berdasarkan Kementerian PUPR Penjelasan : Kemiringan ramp maksimal 1:12 dengan standar kemiringan ramp tidak lebih dari 7°	Belum memenuhi standar ukuran yang tepat
2.	Tinggi Ramp	195 cm		
3.	Tinggi dan Kemiringan 1	45 cm (10°)		
4.	Tinggi dan Kemiringan 2	45 cm (18°)		
5.	Tinggi dan Kemiringan 3	105 cm (21°)		

Desain Standar yang Sesuai :



Gambar 5. Denah Ramp



Gambar 6. Tampak Ramp

Tangga darurat



Gambar 7. Tangga darurat
Tabel.3 Ukuran Tangga darurat

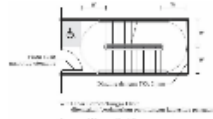
No	Nama Ukuran	Hasil Ukuran (cm)	Standar Ukuran	Ketentuan
1.	Antrade (Lebar)	45cm		Belum memenuhi

anak tangga)

2. Optrade 15cm (Tinggi anak tangga)

3. Tinggi tangga 330 cm

4. Jumlah anak tangga 22



standar ukuran yang tepat

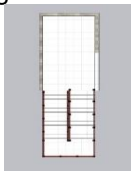
Gambar 8. Standar ukuran tangga darurat berdasarkan Kementerian PUPR
 Penjelasan : Lebar Bordes Tangga Eksit ditentukan berdasarkan perhitungan kapasitas pengguna dengan pintu eksit menutup otomatis, biasanya lebar tangga yang dianjurkan 120 cm

4. Panjang > 120cm lebar bilik x Wc 210cm

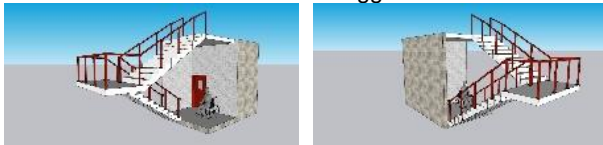
Gambar 12. Standar ukuran toilet berdasarkan Kementerian PUPR
 Penjelasan : Panjang 270 cm x lebar 160 cm per-bilik

Wastafel memiliki standar ketinggian 85 cm dari lantai ke tempat sabun

Desain Standar yang Sesuai :



Gambar 9. Denah Tangga Darurat



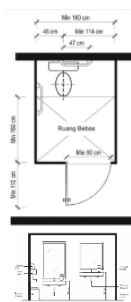
Gambar 10. Tampak Tangga Darurat

Toilet Difabel

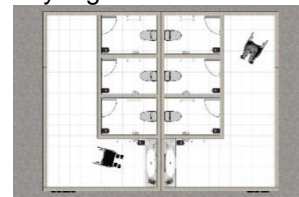


Gambar 11. Toilet Difabel
Tabel.4 Ukuran Toilet Difabel

No	Nama Ukuran	Hasil Ukuran (cm)	Standar Ukuran	Ketentuan
1.	Panjang > lebar ruangan	630cm x 270cm		Belum memenuhi standar ukuran yang tepat
2.	Lebar dan tinggi pintu	70cm dan 200cm		
3.	Lebar wastafel	150cm x 270cm		



Desain Standar yang Sesuai :



Gambar 13. Denah Toilet Difabel
Gambar 14. Tampak Toilet Difabel



Ruang Laktasi



Gambar 15. Ruang Laktasi
Tabel.5 Ukuran Ruang Laktasi

No	Nama Ukuran	Hasil Ukuran (cm)	Standar Ukuran	Ketentuan
1.	Panjang ruangan	480cm		Sudah memenuhi standar ukuran yang tepat
2.	lebar ruangan	330cm		
3.	lebar dan tinggi pintu	70cm dan 200cm		



Gambar 10. Standar ukuran ruang laktasi berdasarkan Kementerian PUPR
 Penjelasan : Panjang 400 cm x lebar 300 cm

Lift Pengunjung

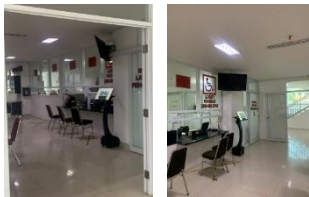


Gambar 16. Lift Pengunjung
Tabel.6 Ukuran Lift Pengunjung

No	Nama Ukuran	Hasil Ukuran (cm)	Standar Ukuran	Ketentuan
1.	Panjang	210cm		Sudah memenuhi standar ukuran yang tepat
2.	lebar	180cm		
3.	Tinggi	210cm		

Gambar 17. Standar ukur lift berdasarkan Kementerian PUPR)
Penjelasan : Panjang 200 cm, lebar 110 cm & tinggi 210 cm

Meja Informasi



Gambar 18. Area Meja Informasi

Tabel.7 Ukuran Meja Informasi

No	Nama Ukuran	Hasil Ukuran (cm)	Standar Ukuran	Ketentuan
1.	Panjang	360cm		Sudah memenuhi standar ukuran yang tepat
2.	lebar	120cm		
3.	Tinggi	60cm		

Gambar 14. Standar ukuran meja informasi berdasarkan Kementerian PUPR
Penjelasan : Memiliki ketinggian meja maksimum 85 cm & meja resepsionis lebih rendah minimal 72 cm

Rambu



Gambar 19. Rambu
Tabel.8 Ukuran Rambu

No	Nama Ukuran	Hasil Ukuran (cm)	Standar Ukuran	Ketentuan
1.	Tinggi	180cm		Sudah memenuhi standar ukuran yang tepat

Gambar 20. Standar ukuran Rambu berdasarkan Kementerian PUPR
Penjelasan : Tinggi peletakan rambu sesuai jarak standar sudut pandang penglihatan pengguna yaitu 30°

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian kajian konsep universal desain pada bangunan pelayanan publik dengan studi kasus : Gedung Kantor Pemerintahan DUKCAPIL Bandar Lampung didapatkan prinsip-prinsip pada desain universal yaitu :

1. Kesetaraan Penggunaan Ruang, pada prinsip pertama ini yaitu *equitable use* (penggunaan yang adil)
2. Kemandirian & Fleksibilitas Dalam Penggunaan Ruang
3. Kemudahan Akses Bebas Hambatan
4. Kemudahan Informasi
5. Keselamatan & Keamanan
6. Efisiensi Upaya Pengguna
7. Kesesuaian Ukuran & Ruang Secara Ergonomis,

Prinsip ini akan digunakan dalam penerapan kesimpulan universal desain yang dibuat sebagai acuan penulis. Sehingga, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa ruangan pada bangunan ini masih kurang menerapkan prinsip yang sesuai standar dari peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka dibuatkannya *re-design* pada beberapa bagian yang telah ditentukan dengan menyesuaikan standar yang ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua yang telah turut serta dalam mengumpulkan data, sehingga penelitian ini dapat berhasil diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini , Z. (2023). Aksebilias Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Muaro Bungo. In Z. Andini. Muaro Bungo, Jambi.
- Firdaus, F., & Iswahyudi, F. (2010). Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk Masyarakat. *Jurnal Unpad*.
- Kurniade, B. D., Maringka, A., & Pramitasari, P. H. (2022). Kantor Pemerintah Kota Malang Tema : Arsitektur Modern. *Pengilon Jurnal Arsitektur Institut Teknologi Nasional Malang*.
- Mumpuni, S. D., & Zainudin, A. (2017). Aksebilias Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Tegal. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*.
- Naima, S. P., Wijayanti, & Indriastjario. (2018). Kajian Penerapan Prinsip Desain Universal Pada Museum. *Jurnal Universitas Diponegoro*.
- Pramashela, F. S., & Rachim, H. A. (2021). Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Pekerjaan Sosial*.
- Supar, E. E., & Rudy , M. (2018). Evaluasi Desain Universal Ruang Terbuka Publik Tepian Air (Kawasan Siring Nol Kilometer Kota Banjarmasin).
- Syarifah, M. (2021, September 16). Konsep Desain Universal Untuk Pembelajaran.
- Wahyuningrum, S. H., & Bharoto, B. (2015). Penerapan Penyelesaian Universal Desain Pada Renovasi Bnagunan Gedung Spesifik (Ruang Terapi Ablasi) RSUP Dr. Kariadi Semarang. *Jurnal Penerapan Universal Desain*.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). *Standar Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan*.